

**KOORDINASI MULTIPihak (*STAKEHOLDER*)
DALAM PELAYANAN AKTA KEMATIAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALEMBANG**

(Studi Kasus Di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Satu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**



Oleh:

AVITA PRAMEIDA SARI

NIM. 07011381924175

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FEBRUARI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**KOORDINASI MULTIPIHAK (*STAKEHOLDER*) DALAM
PELAYANAN AKTA KEMATIAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALEMBANG
(Studi Kasus Di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Satu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

**Avita Prameida Sari
NIM. 0701138192417**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 01 Maret 2023

Pembimbing

**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**



Mengetahui,
Ketua Jurusan



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**KOORDINASI MULTIPIHAK (*STAKEHOLDER*) DALAM
PELAYANAN AKTA KEMATIAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALEMBANG
(Studi Kasus Di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Satu)**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 17 Maret 2023
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


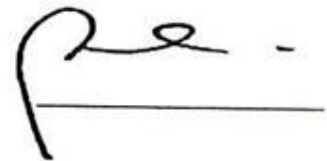
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
Ketua



**Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP.,
MAP**
Anggota




Junaidi, S.IP., M.Si
Anggota



Prof. Dr. Alfitri, M. Si
NIP. 196601221990031004

Mengetahui,



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Jika Memiliki Kesempatan Untuk
Meningkatkan Setiap Aspek Diri, Maka
Teruslah Bekerja Keras Untuk Mewujudkannya
Daripada Hanya Duduk Diam."**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

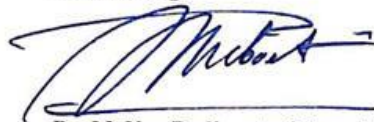
- 1. Kedua orang tua saya**
- 2. Kedua Adik saya**
- 3. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI**
- 4. Rekan Ilmu Administrasi Publik Angkatan
2019**
- 5. Almamater Kebanggaan**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Koordinasi Multipihak (*Stakeholder*) Dalam Pelayanan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Kelurahan Bukit lama Kecamatan Ilir Barat Satu). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Multipihak (*Stakeholder*) Dalam Pelayanan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Kelurahan Bukit lama Kecamatan Ilir Barat Satu). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Drs. Soewarno Handyaningrat, dalam hal ini mengukur koordinasi dapat dinilai dengan menggunakan lima indikator antara lain: 1. Komunikasi, 2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi, 3. Kompetensi Partisipan, 4. Kesempatan, Kesepakatan dan Insentif Koordinasi, dan 5. Kontinuitas Perencanaan. Permasalahan dalam penelitian ini melihat seberapa sadarnya para *stakeholder* dalam berkoordinasi dan berkomitmen dalam melayani akta kematian. Kesimpulannya sudah tergolong kedalam kategori sesuai. Hal ini dilihat dari data lapangan yang penulis sampaikan untuk keseluruhan indikator koordinasi para *stakeholder* telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai para pegawai baik ketua RT01 Bukit Lama, Pegawai Kelurahan Bukit Lama, Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) setempat dan pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam melayani Akta kematian. Disarankan ditingkatkan lagi melalui kesadaran koordinasi sekaligus pengawasan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang karena pegawai perlu diperhatikan agar pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan sasaran kerja dan efektifitas dapat terlihat kemajuan dan untuk tercapainya tujuan koordinasi tugas secara optimal perlu ditingkatkan lagi kesepakatan dan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga penerapan sanksi untuk pegawai yang melanggar kesepakatan.

Kata kunci : Koordinasi, Stakeholder, Akta Kematian, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

Pembimbing



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Palembang 28 Maret 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya




Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research is entitled "Multistakeholder Coordination in the Service of Death Certificates in the Population and Civil Registration Office of Palembang City (Case Study of Bukit Lama Village, Ilir Barat Satu District). The purpose of this study was to find out how Multi-stakeholder Coordination in the Service of Death Certificates at the Population and Civil Registration Office of Palembang City (Case Study of Bukit Lama Village, Ilir Barat Satu District). This study used descriptive qualitative method. This study uses the theory of Drs. Soewarno Handyaningrat, in this case measuring coordination can be assessed using five indicators including: 1. Communication, 2. Awareness of the Importance of Coordination, 3. Competence of Participants, 4. Opportunity, Agreement and Coordination Incentives, and 5. Continuity of Planning. The problem in this study is to see how aware stakeholders are in coordinating and committed to serving death certificates. The conclusion is that it belongs to the appropriate category. This can be seen from the field data that the author conveys for all coordination indicators that stakeholders have carried out their duties and functions as employees, both the head of RT01 Bukit Lama, employees of the Bukit Lama Village, employees of the local Service Technical Implementation Unit (UPTD) and employees of the Population and Civil Registration Office. Palembang City in serving death certificates. It is recommended to increase again through awareness of coordination as well as supervision by leaders or authorized officials because employees need to pay attention so that the work carried out by employees is in accordance with work goals and effectiveness can be seen progress and to achieve the goal of optimal coordination of tasks it is necessary to increase agreement and employees in carrying out work , and also the application of sanctions for employees who violate the agreement.

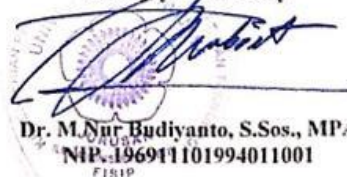
Keywords: Coordination, Stakeholders, Death Certificates, Population and Civil Registration Office of Palembang City.

Advisor



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Palembang 28 March 2023
Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001
FISIP

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avita Premeida Sari

NIM : 07011381924175

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Koordinasi Multipihak (*Stakeholder*) Dalam Pelayanan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Satu)" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 01 Maret 2023



Avita Premeida Sari
NIM. 07011381924175

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kolaborasi Multipihak (*Stakeholder*) Dalam Pelayanan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Illir Barat Satu)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam yang telah mengentaskan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang oleh lampu pijar ilmu pengetahuan. Pada kesempatan yang baik ini, penulis hendak menyampaikan bahwa segala apa yang telah dicapai oleh penulis sampai pada titik ini, bukanlah semata karena usaha dari penulis, melainkan karena karunia dari Allah Ta'ala dan doa-doa yang tiada hentinya dilangitkan oleh kedua orangtua. Untuk itu, skripsi ini yang paling utama, penulis persembahkan atas nama kedua orangtua tercinta, yakni Ayah Sersan Mayor Rizwan Sofi dan Ibu Tiwi Agus Tuti. Terima kasih sudah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, cinta, dan inspirasi yang tiada hentinya. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki jasa besar terhadap kehidupan penulis, antara lain:

1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis dimasa yang akan datang.
5. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Naro Asnawi, SH., M.Si selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil

7. Ibu Herfina Saptalia, SE.,MM selaku Kepala Seksi Kematian Dinas Dukcapil Kota Palembang
8. Ibu Eva Karlia, SE selaku staf bagian Akta kematian Dinas Dukcapil Kota Palembang
9. Ibu Femmy Dwi Utami selaku Kepala Sub Bagian TU UPTD Zona VII di Wilayah Ilir Barat Satu, Ilir Barat Dua dan Gandus
10. Bapak Doni Maryanto, A.Md selaku staff Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Satu
11. Ibu Amelia Virgianti, SE selaku staff Pelayanan Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Satu
12. Bapak Aryadi selaku ketua RT 01 Kelurahan Bukit Lama
13. Terima kasih kepada sepupu tercinta saya Ruaini Dzanatin Aliyah dan Tri Elsa Ramoko yang berpartisipasi memberikan motivasi pada usulan penelitian ini.
14. Terima kasih kepada sahabat saya Adelia, Windi dan Vheren beserta teman seperjuangan saya angkatan 2019 mahasiswa administrasi publik FISIP UNSRI

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakannya dikemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Palembang, 05 Desember 2022

Penulis

Avita Prameida Sari

DAFTAR ISI

JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR SINGKATAN.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Konsep Koordinasi	8
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
3.1.1 Jenis Penelitian	30
3.1.2 Tipe Penelitian	30
3.2 Deskripsi Konsep.....	30
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Sumber Data	32

3.4.1 Data Primer	32
3.4.2 Data Sekunder.....	32
3.5 Informan Penelitian	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	36
4.1.1 Profil Instansi.....	36
4.2 Deskripsi Responden/Informan Penelitian	54
4.3 Hasil penelitian.....	54
4.4 Pembahasan/Diskusi.....	87
BAB V PENUTUP.....	100
5.1 Kesimpulan.....	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan kecamatan	3
Tabel 2 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kerja Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021.....	4
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4 Fokus Penelitian.....	31
Tabel 5 Matriks Hasil temuan Penelitian	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Prosedur Pembuatan Akta	21
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data.....	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	40
Gambar 4. 2 Kegiatan Jemput Bola Di Kelurahan.....	57
Gambar 4. 3 Proses Pemeriksaan Berkas Oleh Petugas.....	58
Gambar 4. 4 Penyerahan Akta Kematian Ke Kelurahan.....	59
Gambar 4. 5 Rekapan Tahunan Pencatatan Kematian Di Kelurahan Bukit Lama	61
Gambar 4. 6 Layanan Online Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang	63
Gambar 4. 7 Postingan Whatsapp Petugas Dinas Dukcapil Kota Palembang	65
Gambar 4. 8 Postingan Intagram Dinas Dukcapil Kota Palembang Mengenai Akta Kematian	66
Gambar 4. 9 Himbauan Penerbitan Akta Kematian Melalui Website	67
Gambar 4. 10 Penyelesaian Pemeriksaan Berkas Masyarakat.....	71
Gambar 4. 11 Proses Pemasukan Data Pengajuan Akta Kematian.....	72
Gambar 4. 12 Merempe Draf Sementara Akta Kematian.....	73
Gambar 4. 13 Penyelesaian Proses Pemasukan Data Di Komputer.....	74
Gambar 4. 14 Jumlah Penduduk Kelurahan Bukit lama	75
Gambar 4. 15 Kebingungan Masyarakat Mengurus Berkas	76
Gambar 4. 16 Paket Akta Kematian (PAKAM).....	86

DAFTAR SINGKATAN

DISDUKCAPIL	= Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
UPTD	= Unit Pelaksana Teknis Dinas
KABID	= Kepala Bidang
KASI	= Kepala Seksi
KK	= Kartu keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
NIK	= Nomor Induk Kependudukan
PAKAM	= Paket Akta Kematian
IMB	= Izin Mendirikan Bangunan
WNA	= Warga Negara Asing
SIAK	= Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
KASUBAG TU	= Kepala Sub Bagian Tata Usaha
DKPP	= Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
WNI	= Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang

Dalam masa reformasi saat ini, tuntutan pemerintah untuk melaksanakan tugas pokoknya secara optimal menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan dan harus dipenuhi. Manajemen kependudukan adalah serangkaian kegiatan struktural dan penerbitan dalam penyampaian dokumen dan informasi pemerintah untuk pengembangan daftar kependudukan, pengelolaan kependudukan dan pemanfaatan yang berguna dalam pelayanan publik dan bidang lainnya.

Koordinasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu indikator penting untuk mewujudkan berhasilnya pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di berbagai bidang. Salah satu contoh adalah pemerintah wajib melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan yang juga membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Pelayanan yang diberikan harus profesional dan menerapkan prinsip tanggung jawab tanpa adanya diskriminasi atau membedakan pihak lainnya.

Pelaksanaan manajemen kependudukan dengan sejumlah kegiatan struktural dan publikasi dalam penyediaan dokumen data kependudukan, pendaftaran penduduk pemanfaatan hasilnya untuk pembangunan pelayanan publik dan sektor lainnya. Penduduk yang bermukim di Indonesia merupakan bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam UU Kependudukan No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan manajemen kependudukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan manajemen

kependudukan yang profesional, standar teknologi informasi, dinamis, teratur dan tidak diskriminatif dalam jangkauannya, minimum, standar pelayanan yang berintegritas, pelayanan publik untuk memecahkan masalah masyarakat.

Dinas Kependudukan tak hanya memeriksa pengambilan formulir yang diperlukan untuk menerbitkan dokumen, tetapi juga harus terorganisir dengan baik, praktis, dan efektif agar warga dapat dengan mudah memahaminya serta bermanfaat secara hukum. Dokumen kependudukan membantu melindungi, mengakui/memvalidasi status atau peristiwa seseorang dalam kehidupannya sehingga warga dapat menghadapi berbagai situasi sehari-hari dengan mudah dan lancar. Selain itu, setiap individu membutuhkan layanan kependudukan sepanjang hidup mereka, dari kelahiran hingga akhir hayat, khususnya melalui pelayanan kependudukan dan pendaftaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan keuntungan bagi pemegang dokumen kependudukan.

UU Pemda No. 23 Tahun 2014 secara khusus menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat akan dipercepat melalui tiga jalur, yaitu peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi sosial. Dengan demikian, nampaknya selain pengaturan dan kewenangan, pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dalam salah satu amanat umum tersebut. Selain itu, sesuai Peraturan Walikota Palembang Nomor 104 Tahun 2011, dalam petunjuk Dinas Pengelolaan Kependudukan dan Catatan Kependudukan, bukti kependudukan adalah surat yang diperpanjang sebagai akibat dari kegiatan daftar penduduk dan penyelenggara kependudukan yang meliputi surat keterangan pindah, surat keterangan pindah, surat keterangan kependudukan, akte kelahiran, akta lahir mati, akta kematian, akta batal perkawinan, akta cerai, akta adopsi, pengakuan dan pengukuhan anak,

catatan pinggir tentang perubahan nama dan kewarganegaraan.

Kota Palembang, sebagai wilayah administratif Indonesia dan juga ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, memiliki populasi yang signifikan. Oleh karena itu, kegiatan penting yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan diadakan di sana. Namun, jika data kependudukan tidak diatur dengan baik, akan terjadi tumpang tindih penduduk, yang dapat menyebabkan kekacauan dalam sistem kependudukan nasional. Pada tahun 2021,

Jumlah penduduk Kota Palembang terbagi ke dalam 18 kelurahan yang tercantum di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Ilir Barat II	67 654
2	Seberang Ulu I	91 697
3	Seberang Ulu II	100 555
4	Ilir Barat I	141 949
5	Ilir Timur I	65 918
6	Ilir Timur II	85 222
7	Sukarami	187 775
8	Sako	112 633
9	Kemuning	80 380
10	Kalidoni	124 336
11	Bukit Kecil	38 439
12	Gandus	75 450
13	Kertapati	92 407
14	Plaju	94 207
15	Alang-Alang Lebar	106 716
16	Sematang Borang	56 914
17	Jakabaring	90 942
18	Ilir Timur III	72 879
	Jumlah	1 686 073

Sumber: Data sekunder Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

Berdasarkan data dalam tabel, populasi kota Palembang tercatat sebanyak 1.686.073 orang dan terdiri dari 18 kecamatan. Tanggung jawab pemerintah terletak pada pengelolaan kependudukan, yang meliputi pembangunan tatanan pengelolaan kependudukan yang terstruktur dengan melibatkan berbagai instansi seperti pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesuksesan dalam pembangunan kependudukan bergantung pada komitmen moral yang diberikan oleh aparatur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan prima

Kecamatan Bukit Lama merupakan salah satu satuan pemerintahan setingkat Kelurahan di Kota Palembang. Desa Bukit Lama memimpin RW hingga 19 RW dan 75 RT dengan jumlah penduduk 41,034 termasuk 20,492 laki-laki dan 20,542 betina. Kepadatan penduduk adalah 33,634 dan persentase penduduknya adalah 29,11%. Hal inilah yang menjadi fokus penulis studi kasus yang mempertimbangkan kepadatan penduduk yang tinggi di kecamatan Ilir Barat Satu, menanggapi data yang diberikan oleh penulis yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepadatan penduduk secara umum baik pelayanan Dinas Kependudukan khususnya kematian sertifikat , menghilang. untuk masyarakat yang sangat lokal.

Tabel 2 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kerja Tahun 2020 dengan Target Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		Satuan	Tahun	
			2020	2021
1	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	88,24	97
2	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	212,56	137,19
3	Persentase pasangan yang menikah non	%	165,98	158,25

	Muslim			
4	Cakupan Kepemilikan Identitas Anak (KIA)	%	42,39	46
5	Jumlah Inovasi Pelayanan	%	13	13
6	Jumlah OPD yang melakukan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	1	2

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah tahun 2021

Tabel 2 menunjukkan cakupan penerbitan akta kematian, memiliki akta kematian pada tahun 2020 sebesar 212,56% dari target 75%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 137,19% dari target 80%. Ini berkurang 74,66%.

Tabel Capaian Kependudukan 2020-2021 dan Daftar Penduduk memiliki beberapa parameter untuk mengevaluasi kinerja program struktur kependudukan. Salah satu dari empat parameter tersebut adalah persentase akta kematian, yang masih jauh dari target yang ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 74,66%. Meskipun program ini sangat penting dan wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah masih memperhatikan pencapaian target yang tinggi namun belum tercapai.

Mendaftar kematian merupakan salah satu masalah yang sangat sulit dalam mengelola populasi. Kematian adalah sebuah peristiwa yang memiliki implikasi hukum, tetapi tidaklah merupakan perbuatan hukum yang diatur oleh undang-undang. Implikasi hukum dari kematian mencakup penetapan ahli waris, suksesi, perwalian, serta peraturan hukum yang melindungi hak dan kewajiban ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan oleh ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk mengatur segala hal

yang berkaitan dengan kematian. Selain itu, pelaporan kematian diperlukan untuk memastikan bahwa data populasi akurat dan faktual

Agar terhindar dari masalah data kependudukan, penting bagi penduduk Indonesia untuk mengikuti peraturan kependudukan yang penting dan wajib dipatuhi. Salah satu peraturan tersebut adalah membuat akta kematian yang dapat diperoleh dari kantor desa atau rumah sakit di mana orang tersebut meninggal. Meskipun sering diabaikan oleh masyarakat, pengurusan akta kematian merupakan peristiwa kependudukan yang sangat penting dalam pengelolaan arsip.

Meskipun jumlah penduduk Kota Palembang yang besar, tidak berarti mengikuti struktur penduduk yang umum. Hal ini terlihat dari rendahnya pencapaian akta kematian, yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah masih rendah. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang memerlukan layanan pengelolaan kependudukan berkualitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saat ini, tujuan penulisan akta kematian belum tercapai karena banyak masyarakat masih berpikir bahwa jika seseorang meninggal, mereka tidak perlu melaporkan atau mengkhawatirkan kematiannya. Masih ada kendala dalam menjangkau daerah-daerah terutama daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah, sehingga angka kematian tetap rendah

Database kematian memegang peran penting dalam merencanakan pembangunan dan melindungi hak sipil warga. Setiap data kematian warga akan dihapus dari Kartu Keluarga Khusus (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta dinonaktifkan dari sistem agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keluarga yang masih hidup akan diberikan Kartu Keluarga baru dengan akta kematian sebagai hasil pemeriksaan.

Menanggapi fenomena yang ada, maka penulis ingin menulis dengan judul “Koordinasi Multipihak (*Stakeholder*) dalam Pelayanan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *stakeholder* yang terlibat dalam proses koordinasi akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, khususnya di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat Satu?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana proses koordinasi *stakeholder* yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang khususnya di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Satu?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan dan informasi karena menambah informasi terkait koordinasi multi pihak dalam Pelayanan Akta Kematian Administrasi Sipil di Dinas Dukcapil Kota Palembang khususnya Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Satu Barat .
2. Manfaat Praktis Bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan peneliti dalam menyelidiki skripsi ini.

5.2 Saran

Mengenai saran yang penulis jadikan sebagai masukan untuk koordinasi multi pihak dalam penerbitan akta kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Studi Kasus Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Satu yaitu.

1. Saran praktis

- 1) Meningkatkan koordinasi antar intan berjaringan untuk mencapai pelayanan yang optimal
- 2) Panduan peralatan manajemen kependudukan dan daftar kependudukan
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui ketersediaan sarana dan prasarana
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daftar penduduk dan data daftar penduduk melalui sosialisasi melalui penyuluhan atau kontak

2. Saran teoritis

- 1) Peneliti menyadari dalam penelitoian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan penelitian yang digunakan masih kurang. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat mengenai permasalahan yang di angkat
- 2) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya meneliti dan mengumpulkan data lebih diperpanjang agar dapat melakukan wawancara secara mendalam.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengevaluasi koordinasi akta kematian pada instansi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. 'Manajemen Pemerintahan Daerah'. Yogyakarta: Graha
- Christianingsih, E. *Pengaruh Koordinasi Terhadap Pelayanan Prima Penerima Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung*.
- Dewi, N. L. Y. (2019). *Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Disdukcapil Palembang. 2019. Profil Perkembangan Kependudukan Kota Palembang (Disdukcapil) Palembang: Disdukcapil Palembang
- Handyaningrat, Soewarno (1985). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen Cetakan Keenam*. Jakarta: PT. Pustaka Setia
- Indriastuti, G. A. P., & Alam, S. *Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan*
- James A.F. Stoner dan Charles Wankel, Management (Prentice Hall, 1986)
- Katili, A. Y. (2020). *Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara*. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.37606/publik.v4i1.44>
- Kennett, P. (Ed.). (2004). *A handbook of comparative social policy*. Edward E (2006) *Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah*.
- Kurniawan, R. C. (2016). *Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah*.
- Kusumatantya, I. (2013). *Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembentukan Komunitas Guna Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, <https://doi.org/10.14710/jwl.1.1.33-48>
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2021. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
- Mamul, Hadi G.A., 2007. 'Membuka Cakrawala Ekonomi'. Bandung: PT. Manajemen. Cetakan Keenam. Jakarta: PT. Pustaka Setia
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil